

## RANCANGAN POJK BANK PERANTARA

| Pasal  | Penjelasan  |
|--|---|
| <b>PERATURAN OTORITAS JASA<br/>KEUANGAN<br/>NOMOR : .../POJK.03/2017<br/>TENTANG<br/>BANK PERANTARA</b>                          | <b>ATAS<br/>PERATURAN OTORITAS JASA<br/>KEUANGAN<br/>NOMOR : .../POJK.03/2017<br/>TENTANG<br/>BANK PERANTARA</b>  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA<br>ESA<br>DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA<br>KEUANGAN,  |   |
| Menimbang:   | I. UMUM   |
| a. bahwa dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan diperlukan upaya pencegahan dan penanganan bank bermasalah;          | Krisis keuangan tahun 1997-1998 memberi pelajaran bagi otoritas dalam menangani stabilitas dalam sistem keuangan. Upaya perbaikan dilakukan untuk mengantisipasi gagalnya sistem keuangan khususnya pada perbankan. Semangat dari penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan adalah penanganan permasalahan Bank dengan menggunakan sumber daya Bank itu sendiri. Bank yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka penanganannya akan diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Salah satu pilihan penyelesaian penanganan Bank bermasalah adalah pembentukan bank perantara. Pembentukan bank perantara merupakan sarana untuk memisahkan aset dan kewajiban bank bermasalah yang dinilai mempunyai kualitas yang baik dengan aset dan kewajiban yang dinilai buruk. Dengan pemisahan tersebut maka bank perantara akan menerima pengalihan aset dan kewajiban yang mempunyai kualitas baik dan selanjutnya bank perantara dapat beroperasi sebagai bank normal. |
| b. bahwa salah satu bentuk tindak lanjut atas penanganan permasalahan bank dapat dilakukan melalui pendirian bank perantara;     |   |
| c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur ketentuan tentang bank perantara. |   |

| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b> |
|---|-------------------|
| Mengingat:  |                   |
| 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); |                   |
| 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);  |                   |
| 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);  |                   |
| 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5811);  |                   |
| <b>MEMUTUSKAN:</b>  |                   |
| Menetapkan:   |                   |
| PERATURAN OTORITAS JASA<br>KEUANGAN TENTANG BANK<br>PERANTARA   |                   |
| <b>BAB I</b>  |                   |
| Ketentuan Umum  |                   |
| Pasal 1   | Pasal 1           |
| 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  | Cukup jelas       |

| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b> |
|--|-------------------|
| Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.   |                   |
| 2. Bank Umum Konvensional adalah Bank Umum yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional.   |                   |
| 3. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah   |                   |
| 4. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.  |                   |
| 5. Bank Asal adalah Bank yang sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya dialihkan kepada Bank Perantara.  |                   |
| 6. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. |                   |
| 7. Lembaga Penjamin Simpanan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan  |                   |
| Pasal 2  | Pasal 2           |
| Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin Otoritas Jasa Keuangan.  | Cukup jelas       |
| Pasal 3  | Pasal 3           |
| Bentuk hukum Bank Perantara adalah Perseroan Terbatas.   | Cukup jelas       |

| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b>   |
|---|---|
| Pasal 4   | Pasal 4   |
| Bank Perantara dapat berupa:  |   |
| a. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional;   | Huruf a<br>Cukup jelas  |
| b. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; dan/atau   | Huruf b<br>Cukup jelas  |
| c. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.  | Huruf c<br>Pelaksanaan pada huruf ini dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga ketentuan pada huruf ini:<br>a. tidak dapat dilakukan apabila jumlah aset yang akan dialihkan dari Bank Asal berupa bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total aset yang dialihkan dari seluruh Bank Asal;<br>b. tidak dapat dilakukan setelah 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. |
| <b>BAB II</b>   |   |
| <b>Pendirian Bank Perantara</b>   |   |
| Pasal 5   | Pasal 5   |
| (1) Bank Perantara hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan.   | Ayat (1)<br>Dengan demikian maka pemegang saham Bank Perantara hanya Lembaga Penjamin Simpanan.   |
| (2) Dalam pendirian Bank Perantara oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku:  | Ayat (2)<br>Cukup jelas   |
| a. ketentuan yang mewajibkan Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Perseroan Terbatas; dan |   |
| b. batas maksimum kepemilikan   |   |

| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b>   |
|--|---|
| saham sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kepemilikan saham bank umum.   |   |
| Pasal 6  | Pasal 6   |
| Pemberian izin Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:  | Cukup jelas   |
| a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara.  |   |
| b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.  |   |
| <b>Bagian Pertama</b>  |   |
| <b>Persetujuan Prinsip</b>   |   |
| Pasal 7  | Pasal 7   |
| Permohonan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diajukan Lembaga Penjamin Simpanan setiap saat atau pada saat terdapat calon Bank Asal yang ditetapkan status pengawasannya sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif. | Dengan adanya pengaturan ini maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara meskipun pada saat pengajuan tidak terdapat calon Bank Asal yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif dan/atau Bank Dalam Pengawasan Khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.<br>Yang dimaksud dengan Bank Dalam Pengawasan Intensif dan/atau Bank Dalam Pengawasan Khusus mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank. |
| Pasal 8  | Pasal 8   |
| (1) Modal dasar untuk mendapatkan persetujuan prinsip paling sedikit sebesar modal dasar untuk pendirian Perseroan Terbatas.   | Jumlah modal dasar untuk pendirian Perseroan Terbatas mengacu pada undang-undang mengenai Perseroan Terbatas.   |
| (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor penuh.  |   |
| Pasal 9  | Pasal 9   |
| Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh Lembaga Penjamin   | Cukup jelas   |

| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b> |
|---|-------------------|
| Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen:  |                   |
| a. anggaran dasar yang paling sedikit memuat:   |                   |
| 1. nama dan tempat kedudukan;   |                   |
| 2. kegiatan usaha sebagai Bank;   |                   |
| 3. permodalan;  |                   |
| 4. kepemilikan;   |                   |
| 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris; dan  |                   |
| 6. persyaratan bahwa pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.  |                   |
| b. bukti setoran modal;   |                   |
| c. struktur organisasi dan sumber daya manusia, pedoman manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, prosedur kerja, rencana sistem teknologi informasi yang akan digunakan, rencana bisnis, dan proyeksi neraca, laba rugi, serta laporan arus kas bulanan.   |                   |
| Pasal 10  | Pasal 10          |
| Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat diganti dengan pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan yang menyatakan bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhi dengan menggunakan data dan/atau dokumen calon Bank Asal yang akan dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya pada saat pengajuan permohonan izin usaha. | Cukup jelas       |
| Pasal 11  | Pasal 11          |
| (1) Dalam rangka memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen.   | Cukup jelas       |
| (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat meminta LPS untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen.   |                   |

| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b>  |
|--|--|
| Pasal 12   | Pasal 12   |
| OJK memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan paling lama:   | Cukup jelas  |
| a. 30 (tiga puluh) hari kerja, apabila permohonan persetujuan prinsip dilakukan setiap saat;   |  |
| b. 10 (sepuluh) hari kerja, apabila permohonan persetujuan prinsip dilakukan dalam hal terdapat calon Bank Asal yang ditetapkan status pengawasannya sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif,   |  |
| setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.  |  |
| Pasal 13   | Pasal 13   |
| Bank Perantara dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.  | Cukup jelas  |
| Pasal 14   | Pasal 14   |
| (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan.   | Cukup jelas  |
| (2) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan maka persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku. |  |
| (3) Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan permohonan dari Lembaga Penjamin Simpanan.   | Yang dimaksud dengan kondisi tertentu yaitu Otoritas Jasa Keuangan memberikan perpanjangan jangka waktu status Bank Dalam Pengawasan Intensif sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum. |
| <b>Bagian Kedua</b>  |  |
| <b>Izin Usaha</b>  |  |
| Pasal 15   | Pasal 15   |
| Pengajuan permohonan izin usaha pendirian Bank Perantara sebagaimana   | Bank Dalam Pengawasan Khusus adalah status pengawasan bank   |

| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b>  |
|---|--|
| dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam hal calon Bank Asal ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus.   | sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.   |
| Pasal 16  | Pasal 16   |
| (1) Modal yang harus disetor untuk mendapatkan izin usaha adalah sebesar permodalan untuk memenuhi ketentuan permodalan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan <i>Countercyclical Buffer</i> . | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan pemenuhan ketentuan KPMM adalah pemenuhan KPMM sesuai profil risiko sesuai dengan aset yang akan dialihkan dari Bank Asal ke Bank Perantara.  |
| (2) Jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetor seluruhnya pada saat pengajuan permohonan izin usaha.   |  |
| Pasal 17  | Pasal 17   |
| Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, disertai dengan dokumen:                           |  |
| a. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;   | Huruf a<br>Bukti pelunasan modal disetor dapat berupa bukti setoran modal kepada rekening Bank Perantara di Bank Indonesia.  |
| b. susunan direksi dan dewan komisaris;   | Huruf b<br>Cukup jelas   |
| c. rencana tindak meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur Bank Perantara;   | Huruf c<br>Cukup jelas   |
| d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dalam hal dokumen tersebut belum disampaikan;   | Huruf d<br>Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c harus disampaikan pada saat pengajuan izin usaha karena dokumen dimaksud digantikan dengan surat pernyataan dari Lembaga Penjamin Simpanan dalam pengajuan izin prinsip. |
| e. bukti kesiapan operasional; dan  | Huruf e<br>Bukti kesiapan operasional antara lain:<br>a. daftar aktiva tetap dan inventaris;<br>dan  |



| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b>   |
|--|---|
|  | b. formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank.  |
| f. dokumen administratif yang diperlukan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.   | Huruf f<br>Cukup jelas  |
| Pasal 18   | Pasal 18  |
| (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:  | Cukup jelas   |
| a. penelitian atas kelengkapan dokumen; dan  |   |
| b. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.   |   |
| (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk melengkapi dan/atau melakukan perbaikan dokumen. |   |
| Pasal 19   | Pasal 19  |
| Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara bersamaan.       | Yang dimaksud dalam kondisi tertentu antara lain Bank yang akan menjadi Bank Asal mengalami penurunan kondisi keuangan yang cepat sehingga Lembaga Penjamin Simpanan tidak memungkinkan mengajukan persetujuan prinsip pendirian Bank Perantara terlebih dahulu.<br><br>Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan secara bersamaan adalah permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip dan permohonan untuk memperoleh izin usaha disampaikan dalam waktu yang sama. |
| Pasal 20   | Pasal 20  |
| Permohonan pendirian Bank Perantara secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disertai dengan kelengkapan dokumen   | Cukup jelas   |

| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b>  |
|---|--|
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c serta Pasal 17 huruf, a, huruf b, huruf c, dan huruf e.   |  |
| Pasal 21  | Pasal 21   |
| Pemberian persetujuan terhadap permohonan pendirian Bank Perantara secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan Otoritas Jasa Keuangan berupa:  | Cukup jelas  |
| a. persetujuan prinsip; dan   |  |
| b. izin usaha,  |  |
| yang diterbitkan bersamaan.   |  |
| Pasal 22  | Pasal 22   |
| Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.  | Cukup jelas  |
| Pasal 23  | Pasal 23   |
| Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 21 setelah terdapat keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menetapkan penyelamatan Bank Asal dilakukan melalui pendirian Bank Perantara. | Meningat penanganan permasalahan Bank Asal harus segera dilakukan maka izin usaha pendirian Bank Perantara harus segera diberikan setelah keputusan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menetapkan penyelamatan Bank Asal dilakukan melalui pendirian Bank Perantara. |
| Pasal 24  | Pasal 24   |
| (1) Bank Perantara yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan kegiatan usaha perbankan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.   | Cukup jelas  |
| (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh Direksi Bank Perantara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.  |  |
| (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Perantara belum melakukan kegiatan usaha, izin yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.   |  |

| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b>   |
|--|---|
| <b>BAB III</b>   |   |
| <b>Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor</b>  |   |
| Pasal 25   | Pasal 25  |
| Bank Perantara dapat menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana Bank Asal.   | Sarana dan prasarana Bank Asal antara lain adalah jaringan kantor, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau prosedur kerja.  |
| <b>Bagian Pertama</b>  |   |
| <b>Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban</b>  |   |
| Pasal 26   | Pasal 26  |
| (1) Bank Perantara menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) Bank Asal.  | Ayat (1)<br>Cukup jelas   |
| (2) Dalam kondisi tertentu, 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) Bank Asal.   | Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah antara lain:<br>a. terdapat lebih dari satu Bank Asal yang harus dialihkan aset dan kewajibannya dalam rentang waktu yang berdekatan;<br>b. menurut penilaian Lembaga Penjamin Simpanan pengalihan aset dan kewajiban lebih efisien kepada satu Bank Perantara;<br>c. diperlukan dalam rangka konsolidasi perbankan. |
| Pasal 27   | Pasal 27  |
| (1) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a:   | Cukup jelas   |
| a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional; atau   |   |
| b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban selain aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. |   |
| (2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b:   |   |
| a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang   |   |

| Pasal   | Penjelasan   |
|---|--|
| melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; atau  |  |
| b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban Unit Usaha Syariah pada 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. |  |
| (3) Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c:  |  |
| a. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah; atau   |  |
| b. menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Asal yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.                    |  |
| Pasal 28  | Pasal 28   |
| Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan:   |  |
| a. aset; dan/atau   |  |
| b. kewajiban,   |  |
| yang memiliki kriteria tertentu.  | <p>Kriteria aset yang dapat dialihkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak sengketa, disita, dan/atau dijaminkan;</li> <li>b. aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank;</li> <li>c. aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank.</li> </ul> <p>Kriteria kewajiban yang dapat dialihkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain; dan</li> <li>b. pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar-Bank, kecuali pinjaman tersebut dijamin</li> </ul> |

| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b>  |
|--|--|
|  | dengan aset Bank.  |
| Pasal 29   | Pasal 29   |
| (1) Dalam hal terdapat aset dan/atau kewajiban Bank Asal lainnya yang akan dialihkan kepada Bank Perantara yang telah melakukan kegiatan usaha maka Bank Perantara paling kurang harus menyampaikan perubahan:   |  |
| a. rencana bisnis;   | Huruf a<br>Cukup jelas   |
| b. rencana tindak yang meliputi cara dan jadwal pengalihan, pemenuhan dan pengelolaan sumber daya manusia, serta migrasi infrastruktur dari Bank Asal yang berbeda tersebut kepada Bank Perantara; dan   | Huruf b<br>Cukup jelas   |
| c. rencana kebutuhan modal.  | Huruf c<br>Rencana kebutuhan modal diperlukan dalam rangka peningkatan permodalan bank untuk menyerap peningkatan risiko dari aset yang diterima dari Bank Asal lainnya. |
| (2) Dalam hal diperlukan peningkatan modal sebagai akibat penambahan pengalihan aset dari Bank lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bank Perantara harus meningkatkan permodalan terlebih dahulu paling kurang pada saat pengalihan aset dimaksud.   | Ayat (2)<br>Cukup jelas  |
| Pasal 30   | Pasal 30   |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank Perantara dimaksud dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan kompetensi akibat penambahan pengalihan aset dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. | Cukup jelas  |
| <b>Bagian Kedua</b>  |  |

| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b>   |
|---|---|
| <b>Operasional Bank Perantara</b>   |   |
| Pasal 31  | Pasal 31  |
| (1) Bank Perantara dapat menjalankan produk dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Asal.   | Cukup jelas   |
| (2) Perizinan untuk menjalankan produk dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh Bank Asal demi hukum beralih kepada Bank Perantara.   |   |
| Pasal 32  | Pasal 32  |
| Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku bagi Bank umum kecuali diatur lain dalam POJK ini.   | Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang terkait dengan kelembagaan bank, kesehatan bank, kehati-kehatian bank dan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. |
| Pasal 33  | Pasal 33  |
| (1) Bank Perantara wajib memenuhi persyaratan modal inti sesuai dengan BUKU Bank Perantara paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank Perantara memulai kegiatan usaha.  | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan BUKU adalah Bank Umum Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.              |
| (2) Dalam hal Bank Perantara tidak dapat memenuhi persyaratan modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Perantara wajib menyesuaikan kegiatan usaha Bank sesuai dengan modal inti yang dimiliki (BUKU). | Ayat (2)<br>Cukup jelas   |
| (3) Penyesuaian kegiatan usaha Bank Perantara sesuai modal inti dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).   | Ayat (3)<br>Cukup jelas   |
| Pasal 34  | Pasal 34  |
| Bank Perantara wajib memenuhi kewajiban tambahan modal sebagai penyangga ( <i>buffer</i> ) dalam bentuk <i>countercyclical buffer</i> paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank Perantara memulai kegiatan usaha      | Penetapan jangka waktu 1 (satu) tahun mempertimbangkan jangka waktu bagi Bank Perantara untuk menyesuaikan kegiatan usaha Bank sesuai dengan modal inti yang dimiliki (BUKU).                   |
| Pasal 35  | Pasal 35  |
| (1) Dalam hal Bank Perantara  | Ayat (1)  |

| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b>  |
|--|--|
| ditetapkan sebagai bank sistemik ( <i>systemically important bank</i> ) maka bank wajib memenuhi tambahan modal sebagai penyangga ( <i>buffer</i> ) dalam bentuk <i>capital surcharge</i> .                      | Yang dimaksud dengan tambahan modal sebagai penyangga ( <i>buffer</i> ) dalam bentuk <i>capital surcharge</i> mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan <i>systemically important bank</i> dan <i>capital surcharge</i> . |
| (2) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penetapan <i>systemically important bank</i> dan <i>capital surcharge</i> . | Ayat (2)<br>Cukup jelas  |
| Pasal 36   | Pasal 36   |
| (1) Bank Perantara dapat melakukan pembukaan jaringan kantor baru untuk mendukung operasional Bank Perantara.  | Cukup jelas  |
| (2) Pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh ketersediaan alokasi modal inti.  |  |
| (3) Dalam menghitung ketersediaan alokasi modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaringan kantor yang berasal dari Bank Asal tidak termasuk dalam perhitungan.   |  |
| Pasal 37   | Pasal 37   |
| (1) Bank Perantara dikecualikan dari penetapan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif atau Bank Dalam Pengawasan Khusus.   | Ayat (1)<br>Yang dimaksud dengan bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus adalah mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank.                                |
| (2) Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkewajiban melakukan tindakan pengawasan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.   | Ayat (2)<br>Cukup jelas  |
| Pasal 38   | Pasal 38   |
| Berdasarkan pertimbangan tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 dan Pasal 34.   | Cukup jelas  |

| <b>Pasal</b>   | <b>Penjelasan</b>  |
|--|--|
| <b>BAB IV</b>  |  |
| <b>Berakhirnya Bank Perantara</b>  |  |
| Pasal 39   | Pasal 39   |
| Bank Perantara sudah tidak lagi menjadi Bank Perantara apabila Lembaga Penjamin Simpanan:  | Cukup jelas  |
| a. menjual seluruh saham Bank Perantara kepada pihak lain; atau  |  |
| b. mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada bank atau pihak lain.   |  |
| Pasal 40   | Pasal 40   |
| Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penjualan seluruh saham Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, maka:  |  |
| a. penjualan seluruh saham harus dilakukan pada saat yang bersamaan.   | Huruf a<br>Dengan demikian Bank Perantara menjadi bank sebagaimana halnya bank umum.   |
| b. jumlah pemegang saham Bank hasil penjualan Bank Perantara wajib memenuhi persyaratan jumlah pemegang saham sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai Perseroan Terbatas.  | Huruf b<br>Cukup jelas   |
| c. pihak yang membeli saham Bank hasil penjualan Bank Perantara dapat memiliki saham bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana pemegang saham yang memiliki Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh LPS sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai kepemilikan saham bank umum. | Huruf c<br>Dalam hal ini kepemilikan tersebut adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak pembelian dari Lembaga Penjamin Simpanan.  |
| d. apabila pada saat beralihnya kepemilikan Bank Perantara dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada pemilik baru masih terdapat kewajiban keuangan yang wajib dipenuhi maka pemilik baru Bank Perantara dimaksud wajib memenuhi kewajiban keuangan pada saat beralihnya kepemilikan Bank Perantara.       | Huruf d<br>Sebagai contoh PT A membeli Bank Perantara pada saat Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Perantara sebagai bank sistemik. Atas penetapan tersebut, PT A wajib menambah modal sebagai penyangga ( <i>buffer</i> ) dalam bentuk <i>capital surcharge</i> Bank Perantara pada saat pembelian. |
| Pasal 41   | Pasal 41   |
| (1) Dalam hal LPS mengalihkan seluruh  | Cukup jelas  |



| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b>   |
|---|---|
| aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b maka pengalihan dapat dilakukan secara bertahap atau secara keseluruhan pada saat bersamaan. |   |
| (2) Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Perantara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penjualan seluruh aset dan/atau kewajiban selesai dilakukan.        |   |
| (3) Tata cara pencabutan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada ketentuan mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank umum.                      |   |
| Pasal 42  | Pasal 42  |
| Lembaga Penjamin Simpanan membubarkan badan hukum Bank Perantara setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.   | Cukup jelas   |
| <b>BAB V</b>  |   |
| <b>Ketentuan Lain</b>   |   |
| Pasal 43  | Pasal 43  |
| (1) Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank Asal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengalihan aset dan/atau kewajiban selesai dilakukan.                             | Ayat (1)<br>Cukup jelas   |
| (2) Dalam rangka pencabutan izin usaha Bank Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan beku kegiatan usaha tertentu paling kurang terhadap:                                   |   |
| a. transaksi dan rekening pihak terkait;  | Huruf a<br>Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. |
| b. penambahan nasabah baru;   | Huruf b<br>Cukup jelas  |
| c. penambahan portfolio baru baik dari sisi aset dan/atau kewajiban.  | Huruf c<br>Cukup jelas  |
| (3) Lembaga Penjamin Simpanan   | Ayat (3)  |

| <b>Pasal</b>  | <b>Penjelasan</b>   |
|---|---|
| membubarkan badan hukum Bank Asal setelah dilakukan pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.  | Cukup jelas   |
| <b>BAB VI</b>   |   |
| <b>Ketentuan Penutup</b>  |   |
| Pasal 44  | Pasal 44  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   | Cukup jelas   |
|   |   |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.     |   |
|   |   |
|   | Ditetapkan di Jakarta<br>Pada tanggal<br><br>KETUA DEWAN KOMISIONER<br>OTORITAS JASA KEUANGAN,<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>MULIAMAN D. HADAD |
| Diundangkan di Jakarta<br><br>Pada tanggal<br><br><br>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI<br>MANUSIA<br><br>REPUBLIK INDONESIA,<br><br><br><br><br><br><br>YASONNA H. LAOLY |   |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK<br>INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR  | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA<br>REPUBLIK INDONESIA NOMOR  |
|   |   |